ADIJAYA
Jurnal Multidisiplin
https://e-journal.naureendigition.com/index.php/mj
Vol. 03, No. 06, 2025, Hal. 765-775
E-ISSN : 2964-7606

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA WIDOSARI

Monica Mutiara Nazarani[1*], Ratna Yosefin Eurolia[2], Natalia Magdalena Nababan [3], Suryani Damayanti [4], Katriza Imania[5], Galuh Efnol Adzan[6], Ade Maulidya[7]

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Sriwijaya, Indralaya
E-mail: *07011282328124@student.unsri.ac.id[1], 07011282328147@student.unsri.ac.id[2], 07011282328116@student.unsri.ac.id[3], 07011182328151@student.unsri.ac.id[4], katrizaimania@fisip.unsri.ac.id[5], galuhefnoladzan@fisip.unsri.ac.id[6], ade.maulidya@fisip.unsri.ac.id[7].

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Desa Wisata Widosari di Kabupaten Kulon Progo yang menerapkan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism/CBT). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan menggunakan model Charles O. Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, berita, artikel, serta dokumen kebijakan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Widosari telah berjalan efektif melalui pemanfaatan sumber daya lokal, peran aktif Pokdarwis, serta dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan atraksi wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasi prinsip *Community-Based Tourism* memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan pelestarian budaya lokal. Implementasi kebijakan di Desa Wisata Widosari telah berkontribusi dalam memajukan desa wisata yang berdaya secara ekonomi dan sosial

**Kata kunci** **Implementasi Kebijakan, Desa Wisata, CBT, Widosari**

***ABSTRACT***

*This study discusses the implementation of the management policy of Widosari Tourism Village in Kulon Progo Regency which implements a community-based tourism approach (Community-Based Tourism / CBT). The purpose of this study is to analyze the implementation of policies using the Charles O. Jones model, which includes aspects of organization, interpretation, and application. The method used is a literature study with a descriptive qualitative approach through the search of various scientific sources such as journals, books, news, articles, and tourism policy documents. The results of the study show that the management of Widosari Tourism Village has been running effectively through the use of local resources, the active role of Pokdarwis, and the support of the local government in the development of tourist attractions and community economic empowerment. The implementation of the principle of Community-Based Tourism has a positive impact on improving the welfare and preservation of local culture. The implementation of policies in Widosari Tourism Village has contributed to advancing economically and socially empowered tourism villages.*

***Keywords*** ***Policy Implementation, Tourism Village, CBT, Widosari***

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman karakter di setiap daerahnya. Kekhasan tersebut menjadi peluang besar bagi pengembangan sektor pariwisata di berbagai wilayah, sehingga pariwisata menjadi salah satu daya tarik utama bagi negara ini. Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 dijelaskan bahwa daya tarik wisata meliputi segala sesuatu yang memiliki ciri khas, pesona, serta nilai, baik yang berasal dari alam, budaya, maupun karya manusia, yang kemudian menjadi alasan bagi pengunjung untuk datang (BPK RI, 2011). Berbagai potensi tersebut memerlukan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seiring berkembangnya sektor pariwisata, muncul kritik terhadap model pengelolaan destinasi yang cenderung *top-down* dan kurang memberdayakan masyarakat. Hal ini kemudian mendorong gagasan mengenai pengelolaan berbasis komunitas. Pariwisata berbasis masyarakat atau *community-based tourism* (CBT) adalah konsep pengelolaan pariwisata yang yang menjadikan masyarakat sebagai aktor utama, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat, sambil tetap menjaga kualitas lingkungan serta melindungi kehidupan sosial dan budaya mereka. (Purmada, Wilopo, dan Luchman Hakim, 2019). Goodwin & Santilli (2009) mengemukakan *community-based tourism* (CBT) merupakan jenis wisata yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh komunitas serta secara khusus bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat tersebut (Musadad, Ibrahim dan Nurlena, 2018). Dengan kata lain, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan pariwisata, hingga menerima manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas pariwisata di daerahnya.

Praktik pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini dapat dilihat melalui pengembangan desa wisata. Menurut Sudibya (2018), desa wisata merupakan sumber daya pariwisata yang berasal dari potensi desa beserta segala keunikan dan daya tariknya. Sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi produk wisata yang bisa menarik perhatian para wisatawan (Sasongko *dkk.*, 2025). Desa wisata menjadi bentuk pengembangan pariwisata di suatu wilayah yang mampu mengangkat ciri khas lokal dan memperkenalkan identitas daerah. Keberadaan desa wisata perlu ditopang oleh peran kelompok-kelompok masyarakat seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), karang taruna, serta warga setempat untuk mengembangkan dan menumbuhkan objek wisata sehingga dapat berjalan secara optimal.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakter geografis dan budaya yang khas. Wilayah ini memiliki topografi perbukitan yang didominasi oleh kawasan Pegunungan Menoreh, sehingga menyimpan banyak potensi alam yang masih terjaga. Dengan luas wilayah sekitar 586,27 $km^2$ dan populasi mencapai lebih dari 440 ribu jiwa, Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten yang berkembang pesat dalam bidang pariwisata karena keindahan alam, budaya, serta keterlibatan masyarakat yang masih menjaga tradisi. Potensi pariwisata Kulon Progo mendorong pengembangan sejumlah desa wisata sebagai bentuk pengelolaan pariwisata yang mengedepankan kekuatan lokal. Salah satu desa wisata yang sedang berkembang dan memiliki ciri khasnya adalah Desa Wisata Widosari, yang berada di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan Menoreh pada ketinggian sekitar 900 mdpl menjadikan desa ini menawarkan daya tarik wisata alam yang berbeda dengan desa wisata lainnya di Kulon Progo (Nugraha *dkk.*, 2024).

Desa Wisata Widosari tidak hanya menarik karena keindahan alamnya, tetapi juga karena perkembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakatnya yang kuat. Desa ini awalnya tumbuh dari inisiasi masyarakat melalui Pokdarwis pada tahun 2012, kemudian mendapatkan dukungan pemerintah desa serta perhatian dari Dinas Pariwisata Kulon

Progo. Seiring proses pengembangan tersebut, Widosari semakin dikenal dan pada tahun 2021 resmi masuk ke dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kulon Progo. Pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Widosari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 (BPK RI, 2021). Regulasi ini menandakan bahwa Desa Wisata Widosari memiliki nilai strategis dalam pembangunan pariwisata daerah. Capaian Desa Wisata Widosari juga terlihat pada tahun 2022, di mana Desa Wisata Widosari berhasil masuk 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan meraih Juara III kategori Desa Wisata Berkembang, yang semakin menguatkan posisinya sebagai destinasi unggulan di Kulon Progo (Dewantara, 2022). Berbagai prestasi tersebut menunjukkan bahwa Widosari memiliki tata kelola dan partisipasi masyarakat yang cukup baik, terutama karena desa ini menerapkan pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) sebagai dasar pengelolaannya.

Penelitian ini meneliti penerapan kebijakan di Desa Wisata Widosari, dengan fokus pada Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis cara kebijakan pengelolaan Desa Wisata Widosari dilaksanakan melalui tiga jenis aktivitas, yaitu pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat, serta menjadi sumber referensi bagi pengembangan desa wisata yang lain.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research). Menurut Sarwono (2006), studi literatur adalah proses mengkaji berbagai sumber referensi, seperti buku dan penelitian sebelumnya yang relevan, guna membangun dasar teori bagi permasalahan yang sedang diteliti (Munib dan Wulandari, 2021). Pendekatan kualitatif deskriptif selanjutnya digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Desa Wisata Widosari di Kabupaten Kulon Progo dengan model Charles O. Jones yang mencakup aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber informasi ilmiah yang relevan, meliputi jurnal, buku, berita, dan dokumen kebijakan seperti RIPPARNAS dan RIPPARDA, artikel resmi pemerintah daerah, serta publikasi yang membahas desa wisata dan kebijakan pariwisata. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dimulai dari proses identifikasi, klasifikasi, reduksi, hingga sintesis informasi ke dalam indikator implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Desa Wisata

Menurut Wiendu Nuryanti (1993: 2–3), desa wisata adalah wujud perpaduan antara daya tarik, tempat tinggal sementara, serta fasilitas penunjang yang disajikan dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang tetap berlandaskan pada adat, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Sedangkan, menurut Widayanti (2021), desa wisata merupakan kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata khas pedesaan, yang menawarkan pengalaman merasakan kehidupan, tradisi, serta berbagai potensi masyarakat desa (David & Rosanto, 2023). Berdasarkan pendapat mengenai desa wisata dapat disimpulkan bahwa desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dengan kehidupan serta

tradisi masyarakat setempat, sehingga mampu menghadirkan pengalaman wisata yang khas dan memanfaatkan potensi lokal sebagai daya tarik utamanya.

**Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism)**

Menurut Suansri (2003), *Community-Based Tourism* adalah kegiatan pariwisata yang menggunakan pendekatan berkelanjutan dari sisi lingkungan, sosial, dan budaya. Tujuannya tidak hanya berfokus pada aktivitas bisnis pariwisata, tetapi juga pada upaya memaksimalkan manfaat bagi para investor (Nabila, Widiyanto dan Ismail, 2025). ASEAN *Community-Based Tourism Standard* (2016) mengemukakan bahwa *Community-Based Tourism* ialah jenis manajemen pariwisata yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat setempat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal, menciptakan peluang hidup yang berkelanjutan, melestarikan serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya, serta melindungi sumber daya alam yang menjadi aset krusial bagi sektor pariwisata (Budiatiningsih, Putri dan Dini, 2024). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism) merupakan sebuah strategi dalam pengelolaan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang hak dan pengelola utama, sehingga kegiatan pariwisata tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Community-Based Tourism* merupakan model pengembangan pariwisata di mana pelaku utama kegiatan ini diposisikan kepada masyarakat lokal. Dalam praktiknya, pendekatan ini sangat erat dengan prinsip *eco-friendly* dan *community empowerment*, karena CBT mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya, tradisi lokal, serta konservasi keanekaragaman hayati. asyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya dan lingkungan alam yang menjadi sumber daya pariwisata mereka (Nofrion *dkk.*, 2025).

**Implementasi Kebijakan Charles O. Jones**

Implementasi kebijakan adalah langkah dalam proses kebijakan publik yang menjamin bahwa kebijakan yang sudah dirancang dapat dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan (Maharaksa *dkk.*, 2025). Sedangkan menurut Nugroho (2003:158), terdapat dua pilihan dalam melaksanakan implementasi kebijakan, yaitu dengan langsung menerapkannya melalui program-program, atau melalui penyusunan kebijakan turunan (derivat) dari kebijakan tersebut (Kaendung, Pangemanan dan Undap, 2021). Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah langkah dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses penerapan ini bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan menjalankan kebijakan secara langsung dalam bentuk program, atau dengan menyusun kebijakan lanjutan sebagai panduan pelaksanaannya.

Menurut Charles O. Jones (1996: 296), dalam proses implementasi kebijakan terdapat tiga jenis aktivitas utama yang perlu diperhatikan (Agustino, 2017), yaitu:

1) Organisasi : penyusunan atau penataan kembali sumber daya, unit, serta metode agar kebijakan dapat menghasilkan keluaran atau dampak yang diharapkan.
2) Interpretasi : proses menerjemahkan isi kebijakan menjadi rencana dan arahan yang jelas, dapat dipahami, serta dapat dijalankan.
3) Penerapan : pelaksanaan rutin berupa pelayanan, pembayaran, maupun kegiatan lain yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan program.

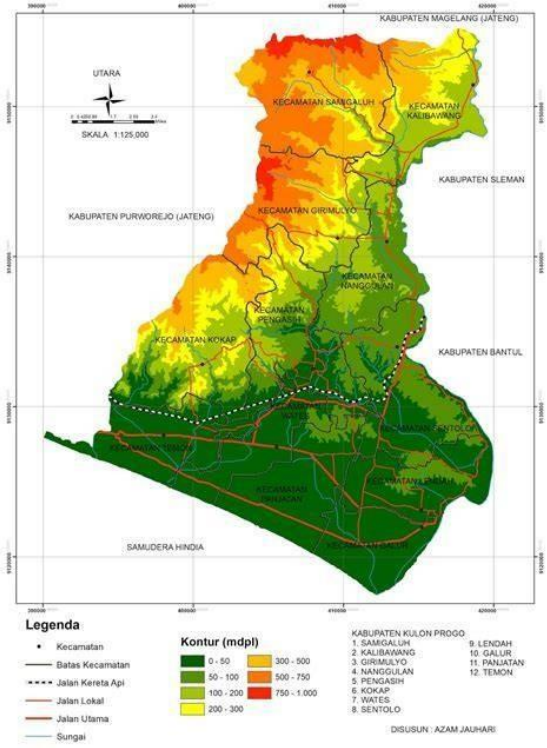
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Jones, implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian proses yang mencakup tahap pengorganisasian, interprestasi, dan aplikasi (penerapan) kebijakan.

Dalam pengelolaan pariwisata, khususnya desa wisata, kebijakan menjadi dasar untuk memetakan langkah yang dapat diambil dalam mengembangkan dan memelihara desa wisata agar tetap lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pengembangan kepariwisataan yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan lokal dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) yakni dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2010 sampai tahun 2025 (BPK RI, 2011). Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa adalah sebuah langkah untuk memperbaiki kualitas kehidupan, keterampilan, akses, serta partisipasi masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dalam meningkatkan taraf hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui aktivitas pariwisata.

**Gambaran Desa Wisata Widosari di Kabupaten Kulon Progo**

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Yogyakarta yang memiliki keistimewaan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kulon Progo memiliki luas area kurang lebih 586,27 $km^2$ dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 444.516 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Kabupaten ini memiliki karakter topografi khas berupa hamparan perbukitan. Kondisi geografis tersebut membuat Kulon Progo memiliki kekayaan alam dan budaya yang masih terjaga.

**Gambar 1. Peta Kabupaten Kulon Progo**




Pada bagian barat laut kawasan ini terdapat Pegunungan Menoreh, yang menjadi salah satu wilayah dengan perkembangan desa wisata yang cukup menonjol, termasuk Desa Wisata Widosari. Desa Wisata Widosari merupakan salah satu destinasi unggulan di

Kabupaten Kulon Progo. Desa ini berlokasi di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, dan berada di kawasan perbukitan Menoreh bagian utara dengan ketinggian sekitar 900 mdpl. Lokasinya dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 15 menit atau sekitar 36 km dari Yogyakarta (Nugraha *dkk.*, 2024). Desa Wisata Widosari kemudian berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan Kulon Progo berkat perpaduan potensi alam, budaya, dan aktivitas masyarakat yang dikelola secara berkelanjutan. Letaknya di kawasan Menoreh menjadikan desa ini identik dengan lanskap bukit, jalur trekking, spot pemandangan, serta ikon batu raksasa purba yang menjadi ciri khas Puncak Widosari. Selain potensi alam, desa ini juga memiliki kekayaan budaya, tradisi, serta berbagai produk buatan masyarakat yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

**Implementasi Kebijakan Charles O. Jones Dalam Pengelolaan Desa Wisata Widosari Kabupaten Kulon Progo**

Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Desa Wisata Widosari Kabupaten Kulon Progo dapat dapat dianalisis melalui Model Charles O. Jones (1996: 296) yakni dengan melihat proses pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi (penerapan) yang dilaksanakan di Desa Wisata Widosari Kabupaten Kulon Progo.

1. Organisasi

   Menurut Charles O. Jones, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan keberadaan organisasi atau lembaga yang menjalankan kebijakan tersebut. Jones (1996:296) menjelaskan bahwa aspek organisasi mencakup: a) pembentukan atau penataan ulang sumber daya, b) penataan unit-unit terkait, serta c) penyusunan metode agar program dapat berjalan efektif (Adriansyah, Alexandri dan Halimah, 2021). Ketiga aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

   a) Sumber Daya

      Sumber daya adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam pengembangan desa wisata. Sumber daya ini mencakup bahan-bahan yang tersedia di lingkungan desa, serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, organisasi lokal, dan pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata (Yusnita, Samin dan Subiyakto, 2024).

      Sumber daya pariwita merujuk pada daya tarik yang dimiliki suatu daerah wisata untuk dapat menarik wisatawan berkunjung, menikmati dan mempelajari karakteristik daerah tersebut. Sumber daya ini terbagi menjadi 3, (Esranisagari, 2023) yakni:

      1) Sumber Daya Alam

         Desa Wisata Widosari memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial. Keindahan Puncak Widosari menjadi daya tarik utamanya, menghadirkan panorama matahari terbit dan terbenam, jalur trekking, serta pemandangan perbukitan Menoreh. Ikon khas desa ini adalah batu purba berukuran besar yang berbentuk menyerupai wajah manusia. Dari lokasi ini, wisatawan juga dapat melihat keindahan Gunung Merapi, Sindoro, dan Sumbing (Visiting Jogja, 2025). Di Desa Wisata Widosari juga terdapat hamparan Kebun Teh Kemadon yang luas, di mana pengunjung dapat berfoto-foto atau sekedar menikmati suasana alam.

      2) Sumber Daya Budaya

         Desa Wisata Widosari juga memiliki kekayaan budaya yang kuat. Secara berkala, masyarakat menyelenggarakan berbagai tradisi seperti upacara merti desa, kenduri, dan nyadran, yang biasanya diiringi dengan kirab hasil bumi serta berbagai pertunjukan seni tradisional. Selain itu, Desa Wisata Widosari juga menyuguhkan berbagai seni pertunjukan seperti tari Bangilun, Jathilan, Wayang Kulit, dan Cokekan (Visiting Jogja, 2025).

3) Sumber Daya Buatan Manusia

Desa Wisata Widosari menawarkan wisata edukasi berupa peternakan domba yang memberikan pembelajaran tentang peternakan, pengolahan pupuk, dan kuliner olahan domba. Wisata edukasi ini dikenal dengan nama Rajendra Farm. Selain itu, desa ini juga memiliki Cip Jangel, yaitu paket wisata edukasi yang memberikan pengalaman kepada pengunjung melalui pemanfaatan limbah tongkol jagung sebagai bahan utama kerajinan tangan. Kerajinan tersebut dikelola oleh masyarakat Desa Widosari melalui UMKM yang ada di desa, dan hasil olahannya dapat menjadi produk kreatif seperti sandal, kotak pensil, lukisan, serta hiasan dekoratif yang dapat menjadi oleh-oleh dari Desa Wisata Widosari.

Program wisata edukasi di Desa Wisata Widosari juga sangat beragam. Beberapa di antaranya meliputi edukasi batik tradisional melalui studio batik "Rupa-Rupa Batik" yang dikelola oleh masyarakat setempat, edukasi pengolahan teh sangrai tradisional, pelatihan tari klasik, pembelajaran gamelan Jawa, edukasi menanam padi secara tradisional, pelatihan ecoprint, edukasi pembuatan pupuk organik, pelatihan anyaman bambu, serta edukasi pembuatan enting-enting jahe. Desa Wisata Widosari juga menyediakan *homestay* dan *live-in,* serta fasilitas transportasi seperti mobil shuttle dan layanan pemandu yang membantu pengunjung menikmati pengalaman wisata sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat.

b) Unit-unit/ Struktur Organisasi

Menurut Charles O. Jones, perlu dilakukan penataan ulang struktur organisasi secara rinci hingga pada unit-unit terkecil agar tujuan implementasi kebijakan dapat tercapai. Intinya, untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah harus mengumpulkan serta menyediakan sumber daya yang diperlukan (Adriansyah, Alexandri dan Halimah, 2021). Dalam pengelolaan Desa Wisata Widosari, dapat dilihat bahwa Pokdarwis Desa Wisata Widosari merupakan pelaksana utama sekaligus pihak yang menginisiasi terbentuknya desa wisata ini. Pengelolaan tersebut kemudian didukung oleh Pemerintah Kalurahan Ngargosari dan Dinas Pariwisata Kulon Progo untuk mengembangkan Desa Wisata Widosari menjadi desa wisata yang bertaraf nasional (*Masuk 50 Desa Wisata Terbaik, Widosari Memang Cantik & Menarik*, 2024).

Keberadaan kelompok lain seperti UMKM lokal, kelompok seni, serta masyarakat sekitar juga berperan penting dalam mendukung pengelolaan Desa Wisata Widosari. Hal ini bertujuan agar desa wisata benar-benar memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Peran UMKM dapat terlihat dari kegiatan pengelolaan kerajinan berbahan tongkol jagung, batik, enting-enting jahe, dan berbagai produk lain yang tidak hanya menambah pendapatan masyarakat, tetapi juga menambah wawasan bagi para pengunjung. Dengan demikian, terdapat pembagian tugas antarmasyarakat yang saling mendukung satu sama lain sehingga mampu meningkatkan nilai Desa Wisata Widosari di mata masyarakat luas.

c) Metode

Metode dalam implementasi kebijakan merupakan strategi dan mekanisme kerja yang digunakan supaya program bisa terjalankan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam kegiatan pengembangan Desa Wisata Widosari, metode implementasinya dapat dilihat melalui berbagai aktivitas dan pelaksanaan

program. Metode terlihat melalui sistem pengelolaan tiket bagi wisatawan yang berkunjung, mulai dari pengaturan mekanisme penjualan tiket hingga pengelolaan penerimaannya. Selain itu, metode implementasi juga tampak pada penerapan SOP kebersihan, keamanan, dan pelayanan, serta pembagian tugas antara pemandu wisata, petugas parkir, petugas spot foto, dan penjaga fasilitas lainnya.

Terdapat metode pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan melalui pelatihan pemandu wisata, manajemen homestay, pengembangan produk kuliner, dan UMKM. Melalui metode ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan serta penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan budaya di Desa Wisata Widosari, sehingga tujuan pemberdayaan dapat tercapai dan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari kegiatan pariwisata (Visiting Jogja, 2025). Selain itu, metode implementasi juga terlihat dalam strategi promosi, yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan website, serta melalui kerja sama dengan Dinas Pariwisata melalui platform Jadesta dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terakhir, metode implementasi kebijakan tampak pada pengembangan atraksi wisata, seperti penambahan fasilitas foto, jalur trekking, program edukasi peternakan dan kerajinan, serta penyediaan beragam paket wisata agar pengunjung dapat memilih sesuai kebutuhan dan minat mereka.

2. Interpretasi

Interpretasi mengindikasikan bahwa para pelaksana kebijakan perlu memiliki kemampuan untuk melaksanakan program sesuai dengan panduan teknis dan petunjuk pelaksana, yang berfungsi sebagai acuan dalam mencapai tujuan yang diinginkanterpretasi kebijakan dalam pengelolaan (Adriansyah, Alexandri dan Halimah, 2021). Interpretasi kebijakan dalam pengelolaan Desa Wisata Widosari dapat dilihat dari bagaimana berbagai aturan dan rencana pembangunan pariwisata diterjemahkan menjadi arah pengembangan yang lebih konkret di tingkat desa. Puncak Widosari sendiri mulai dirintis sejak tahun 2012 sebagai destinasi wisata alam. Kemudian pada tahun 2017, Pokdarwis dan Karang Taruna, dengan dukungan dari Dinas Pariwisata Kulon Progo, mulai mengembangkan dan menggarap Puncak Widosari secara lebih serius (Sutarmi, 2018).

Tahap interpretasi semakin terlihat ketika pada tahun 2021, Puncak Widosari secara resmi dimasukkan dan dicantumkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kulon Progo. Masuknya Widosari dalam dokumen perencanaan strategis ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Dalam RIPPARDA tahun 2021, interpretasi kebijakan diwujudkan melalui penyusunan program dan indikasi kegiatan pembangunan destinasi wisata. Sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah mengembangkan wisata alam pegunungan di Perbukitan Widosari. Sementara itu, indikasi programnya meliputi:

a) Pengembangan spot view Perbukitan Widosari, dan
b) Pengembangan wisata kuliner berbasis pemandangan alam di Perbukitan atau Puncak Widosari.

Program tersebut menempatkan Dinas Pariwisata sebagai penanggung jawab utama, dengan pelaksana pendukung berupa Organisasi Perangkat Daerah terkait, pihak swasta, serta masyarakat. Tahun pelaksanaannya ditetapkan mulai 2024 hingga 2025 (BPK RI, 2021). Interpretasi kebijakan juga tercermin dalam bagaimana Pokdarwis dan Karang Taruna menerjemahkan arah kebijakan tersebut ke dalam pengelolaan desa wisata. Mereka mengembangkan Widosari

melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola destinasi. Upaya ini menghasilkan capaian luar biasa, yakni keberhasilan Desa Wisata Widosari masuk dalam 50 besar nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan meraih peringkat ketiga sebagai Desa Wisata Berkembang pada tahun 2022 (Dewantara, 2022).

3. Aplikasi

Desa Wisata Widosari telah menerapkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism). Penerapan ini tercermin dari berbagai aktivitas yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Beragam kegiatan usaha mikro masyarakat menjadi bagian penting dari pengelolaan desa wisata, seperti UMKM kerajinan dari tongkol jagung, kegiatan peternakan, produksi enting-enting, kerajinan batik, penyediaan homestay, serta program live in yang sepenuhnya dikelola oleh warga (Visiting Jogja, 2025).

Pelibatan masyarakat ini menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Widosari diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi warga desa. Dengan demikian, desa wisata benar-benar berfungsi sebagai ruang pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan amanat RIPPARNAS, yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan destinasi wisata (BPK RI, 2011). RIPPARNAS menggarisbawahi bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama yang berperan dalam perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kegiatan pariwisata, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal. Implementasi pengelolaan di Desa Wisata Widosari yang mengoptimalkan keterlibatan warga, baik dalam UMKM, jasa wisata, maupun kegiatan budaya, menunjukkan bahwa desa ini telah menjalankan prinsip-prinsip pemberdayaan tersebut secara nyata.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Desa Wisata Widosari Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan desa wisata telah berjalan efektif melalui tiga aktivitas utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pada tahap organisasi, Desa Wisata Widosari menunjukkan adanya penguatan kelembagaan melalui peran Pokdarwis, Karang Taruna, serta pemberdayaan UMKM yang dikelola oleh masyarakat desa. Bentuk pemberdayaan tersebut terlihat dari berbagai kegiatan usaha yang diinisiasi dan dijalankan oleh warga. Selain itu, dukungan dari pemerintah kabupaten, kalurahan, dan Dinas Pariwisata turut memperkuat proses pengembangan melalui pengelolaan sumber daya alam, budaya, dan sumber daya buatan masyarakat yang dilakukan secara optimal, sehingga menghasilkan daya tarik wisata yang beragam dan berkelanjutan. Pembagian tugas serta metode pelayanan wisata juga tampak tersusun dengan baik.

Pada aktivitas interpretasi, kebijakan pariwisata yang tercantum dalam RIPPARDA Kulon Progo dapat diterjemahkan ke dalam arah pengembangan yang jelas di tingkat desa. Hal ini tergambar dari berbagai program yang berfokus pada pengembangan wisata alam, spot view, wisata kuliner, serta peningkatan fasilitas pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isi kebijakan mampu dipahami dan diimplementasikan secara tepat oleh Pokdarwis dan masyarakat Desa Wisata Widosari.

Kemudian, pada tahap aplikasi, Desa Wisata Widosari secara konsisten menerapkan prinsip *community-based tourism* (CBT) dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan pariwisata. Penerapan ini tercermin melalui pengelolaan UMKM

lokal, penyediaan *homestay*, program l*ive in*, kerajinan tangan, pelestarian seni budaya, edukasi pertanian, serta berbagai layanan wisata lainnya. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Desa Wisata Widosari terbukti mampu mendorong desa menjadi destinasi wisata yang berkembang, berdaya saing, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA


Adriansyah, A., Alexandri, M.B. dan Halimah, M. (2021) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG," *Responsive*, 4(1), hlm. 13. Tersedia pada: https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34108.

Agustino, L. (2017) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 7 ed. Bandung: Alfabeta.

BPK RI (2011) *Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025*, *Database Peraturan | JDIH BPK*. Tersedia pada: http://peraturan.bpk.go.id/Details/5183/pp-no-50-tahun-2011 (Diakses: 21 November 2025).

BPK RI (2021) *PERDA Kab. Kulon Progo No. 2 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025*, *Database Peraturan | JDIH BPK*. Tersedia pada: http://peraturan.bpk.go.id/Details/173452/perda-kab-kulon-progo-no-2-tahun-2021 (Diakses: 21 November 2025).

Budiatiningsih, M., Putri, B.P. dan Dini, M.F. (2024) "KEBERHASILAN PENERAPAN KONSEP PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT: STUDI KASUS DI DESA WISATA NGLANGGERAN," *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 13(1), hlm. 123–136.

Dewantara, J.R. (2022) *Widosari Masuk 50 Besar ADWI 2022, Sandiaga: Bangkitkan Ekonomi Pascapandemi*. Tersedia pada: https://www.detik.com/jateng/wisata/d-6159125/widosari-masuk-50-besar-adwi-2022-sandiaga-bangkitkan-ekonomi-pascapandemi (Diakses: 21 November 2025).

Esranisagari, R. (2023) "3 (Tiga0 Sumber Daya Pariwisata," 17 Februari. Tersedia pada: https://www.kompasiana.com/esrani081230/63ef469cc57afb4abc2b7b75/3-tiga-sumber-daya-pariwisata (Diakses: 21 November 2025).

Jauhari, A. (2020) "PETA KABUPATEN KULON PROGO," 14 April. Tersedia pada: https://azamjalanjalan.blogspot.com/2020/04/peta-kabupaten-kulon-progo.html (Diakses: 22 November 2025).

Kaendung, E., Pangemanan, F. dan Undap, G. (2021) "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado," *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2), hlm. 1–11.

Maharaksa, M.S. *dkk.* (2025) "Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus," *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), hlm. 69–73. Tersedia pada: https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.320.

*Masuk 50 Desa Wisata Terbaik, Widosari Memang Cantik & Menarik* (2024).

Munib, A. dan Wulandari, F. (2021) "Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar," *JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA*, 7(1), hlm. 160–172. Tersedia pada: https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16154.

Musadad, M., Ibrahim, M. dan Nurlena, N. (2018) "FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CBT: STUDI KASUS EKOWISATA MANGROVE MENGKAPAN DI PROVINSI RIAU," *National Conference of Creative Industry*, hlm. 342–350. Tersedia pada: https://doi.org/10.30813/ncci.v0i0.1253.

Nabila, B.S., Widiyanto, M.K. dan Ismail, H. (2025) "PENERAPAN COMMUNITY BASED TOURISM UNTUK MENINGKATKAN WISATAWAN DALAM PENGEMBANGAN

WISATA KOTA LAMA SURABAYA," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik,* 5(1), hlm. 68–84.

Nofrion *dkk.* (2025) "PENGEMBANGAN EKOWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS KOMUNITAS (COMMUNITY BASED TOURISM) DI NAGARI KOTO SANI," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), hlm. 354–360. Tersedia pada: https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.35569.

Nugraha, S.Y.I. *dkk.* (2024) "PENERAPAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI DESA WIDOSARI, KABUPATEN KULONPROGO," *Bogor Hospitality Journal*, 8(1), hlm. 38–46. Tersedia pada: https://doi.org/10.55882/bhj.v8i1.117.

Purmada, D.K., Wilopo, dan Luchman Hakim (2019) "PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF COMMUNITY BASED TOURISM," *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32(2), hlm. 15–22.

Sasongko, Y.P. *dkk.* (2025) "Integration of Argo Binangun Tourism Awareness Group and Geotourism: Sustainable Development of Widosari Tourism Village, Yogyakarta," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 27(1), hlm. 101–108. Tersedia pada: https://doi.org/10.25077/jantro.v27.n1.p101-108.2025.

Sutarmi (2018) *Warga Kulon Progo kembangkan wisata puncak Widosari*, *Antara News Yogyakarta*. Tersedia pada: https://jogja.antaranews.com/berita/352870/warga-kulon-progo-kembangkan-wisata-puncak-widosari (Diakses: 21 November 2025).

Visiting Jogja (2025) "Desa Wisata Widosari: Pesona Alam, Budaya, dan Edukasi di Kulon Progo," *Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta*, 24 April. Tersedia pada: https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/42502/desa-wisata-widosari-pesona-alam-budaya-dan-edukasi-di-kulon-progo/ (Diakses: 21 November 2025).

Yusnita, Y., Samin, R. dan Subiyakto, R. (2024) "Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan," *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2), hlm. 106–122. Tersedia pada: https://doi.org/10.37329/metta.v4i2.3392.